

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Citra Nasir¹, Andi Fatmawati Syam², Nasrah Hasmiati Attas³

Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo^{1,2,3}

Email: citranasir23@gmail.com, andifatmawatysyam@gmail.com,
nasrah.hasmiati@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menjaga kesesuaian antara produk hukum dan konstitusi, dengan kewenangannya dalam menguji undang-undang serta memberikan keputusan yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar negara. Keputusan-keputusan MK seringkali memicu perubahan substansial dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia tanpa memerlukan amandemen formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode normatif dan analisis dokumen, yang berfokus pada kajian terhadap teks putusan MK dan perbandingannya dengan UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap perubahan tafsiran pasal-pasal dalam UUD 1945, seperti pada putusan mengenai Pasal 22E Ayat (2) yang memperjelas prinsip checks and balances dalam pengangkatan pejabat tinggi negara, serta pada putusan mengenai Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan terkait kebebasan berpendapat demi kepentingan umum. Implikasi dari keputusan-keputusan MK ini menunjukkan adanya perubahan dalam penerapan konstitusi yang lebih dinamis, meningkatkan perlindungan hak konstitusional, serta memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi. Keputusan MK memainkan peran penting dalam memperbaharui tafsiran terhadap pasal-pasal konstitusi, yang pada akhirnya memperkuat sistem hukum Indonesia dan menjamin keberlanjutan prinsip-prinsip dasar negara di tengah perubahan sosial-politik yang terjadi.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perubahan Undang-Undang Dasar, Interpretasi Konstitusional

Abstract

The Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) plays a crucial role in ensuring the alignment between legal products and the constitution, with its authority to review laws and provide decisions that can influence the understanding of the basic principles of the state. The decisions of the Constitutional Court often trigger substantial changes in Indonesia's legal and governance systems without requiring formal amendments. This research employs a descriptive-analytical approach using normative methods and document analysis, focusing on the study of the Constitutional Court's rulings and their comparison with the 1945 Constitution. The findings indicate that the Constitutional Court's decisions have a significant impact on the interpretation of articles within the 1945 Constitution, such as the

decision on Article 22E Paragraph (2) that clarifies the principle of checks and balances in the appointment of high state officials, and the decision on Human Rights which sets limitations on freedom of expression for the sake of public interest. The implications of these decisions show a more dynamic application of the constitution, enhancing the protection of constitutional rights and reinforcing the principles of the rule of law and democracy. The Constitutional Court plays an important role in renewing interpretations of constitutional articles, ultimately strengthening Indonesia's legal system and ensuring the continuity of the basic principles of the state amid ongoing socio-political changes.

Keywords: *Decision of the Constitutional Court, Amendment of the Constitution, Constitutional Interpretation*

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sebagai konstitusi negara memiliki peran fundamental dalam mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan hak-hak warga negara. Sebagai dokumen yang dinamis, UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tetap, tetapi juga harus dapat beradaptasi dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perubahan dalam konstitusi yang dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 sendiri. Mekanisme perubahan ini, meskipun terstruktur dalam bentuk amandemen, sering kali lebih kompleks dalam praktiknya, dan dapat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang hukum, salah satunya Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, dan bahkan memutuskan pembubaran partai politik (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020). Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh MK tidak hanya berdampak pada interpretasi pasal-pasal dalam UUD 1945, tetapi juga sering kali memicu perubahan substansial dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia tanpa perlu adanya amandemen formal. Dalam hal ini, keputusan MK berfungsi sebagai instrumen untuk memperbaharui dan menafsirkan ulang pasal-pasal dalam UUD 1945, sehingga dapat menyesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan hukum yang berkembang.

Seiring waktu, beberapa keputusan MK telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum Indonesia. Sebagai contoh, keputusan MK mengenai hak konstitusional warga negara atau kebijakan pemilu telah menghasilkan penafsiran baru yang memperjelas dan mempertegas hak-hak tersebut dalam konstitusi. Keputusan-keputusan tersebut tidak hanya memberi dampak pada penegakan hukum yang lebih adil, demokratis, dan transparan, tetapi juga memberikan ruang bagi penguatan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia (Marbun, 2018). Dengan demikian, keputusan MK berperan penting dalam memperkuat sistem hukum Indonesia melalui interpretasi yang dinamis dan kontekstual.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana putusan MK mempengaruhi perubahan atau interpretasi terhadap UUD 1945, baik yang

bersifat formal melalui amandemen maupun non-formal melalui perubahan dalam penerapan atau tafsiran pasal-pasal konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut mengenai peran dan dampak putusan MK terhadap perubahan konstitusional serta implikasinya bagi sistem hukum dan pemerintahan Indonesia di masa depan. Analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga konsistensi dalam pelaksanaan konstitusi dan memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan sosial-politik yang terjadi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif dan analisis dokumen, yang berfokus pada kajian terhadap teks putusan MK dan perbandingannya dengan UUD 1945. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk putusan MK, dokumen hukum terkait, dan literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, dengan langkah-langkah pengumpulan putusan MK dan analisis dokumen hukum.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mencakup identifikasi keputusan-keputusan MK, analisis dampaknya terhadap prinsip UUD 1945, serta perbandingan dengan teks asli UUD 1945. Penelitian ini memiliki batasan pada putusan MK yang berkaitan langsung dengan perubahan atau penafsiran pasal-pasal dalam UUD 1945 dan dampaknya terhadap penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai dampak putusan MK terhadap perubahan konstitusional dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi memiliki peran krusial dalam menjaga kesesuaian antara produk hukum dan UUD 1945. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga mempengaruhi pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasar konstitusi dalam konteks sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap putusan MK serta mengevaluasi dampak yang ditimbulkan, guna memahami bagaimana keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi perkembangan sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia.

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam interpretasi dan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945, meskipun tidak melalui proses amandemen formal. Keputusan-keputusan MK yang terkait dengan hak konstitusional warga negara, pembatasan kekuasaan negara, serta sistem pemerintahan memberikan dampak signifikan terhadap tafsiran pasal-pasal UUD 1945, dan sering kali memperkenalkan pemahaman baru yang lebih jelas dan aplikatif dalam konteks hukum Indonesia.

Beberapa contoh putusan MK yang memiliki pengaruh besar antara lain:

- a. Putusan MK mengenai Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945

Pasal ini mengatur pembatasan kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan pejabat tinggi negara. Dalam putusan MK, diinterpretasikan bahwa pembatasan kewenangan tersebut harus didasarkan pada prinsip *checks and balances*, yang memberikan ruang bagi lembaga-lembaga negara lainnya untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan eksekutif. Ini memperjelas prinsip demokrasi dan menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga negara (Mahkamah Konstitusi, 2013).

Hal ini dikarenakan prinsip *checks and balances* penting untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang memiliki kewenangan yang terlalu besar atau terpusat pada satu pihak saja yakni eksekutif saja dan memungkinkan adanya pengawasan yang adil dari lembaga legislative, sehingga sejalan dengan prinsip demokrasi dan transparansi dengan melibatkan DPR dalam proses pengangkatan pejabat tersebut menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi oleh public yang diharapkan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan secara objektif dan mengutamakan kepentingan negara, bukan berdasarkan pertimbangan politik atau kepentingan sempit lainnya. Demokrasi menuntut adanya proses yang transparan agar setiap keputusan pemerintah, terutama dalam pengangkatan pejabat publik, dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Selain itu, berfungsi juga untuk menjaga pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sehingga adanya pembatasan ini, Presiden tidak dapat bertindak sepenuhnya tanpa pengawasan dari lembaga negara lain. Pemisahan kekuasaan yang jelas menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang dapat merusak keseimbangan sistem pemerintahan dan mengarah pada tirani atau penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih jauh, MK melihat bahwa keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan pejabat tinggi negara memiliki dampak positif terhadap *profesionalisme* birokrasi pemerintahan. Proses yang melibatkan pengawasan legislatif ini memastikan bahwa pengangkatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas dan integritas, bukan hanya pertimbangan politis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, di mana pejabat tinggi negara yang diangkat memiliki kredibilitas dan uprofesionalisme yang tinggi.

Dengan demikian, putusan MK ini bertujuan untuk menguatkan sistem *checks and balances* dalam pemerintahan Indonesia dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Dengan adanya pengawasan dari DPR dalam pengangkatan pejabat tinggi negara, proses tersebut dapat berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan negara. Sebagai hasilnya, sistem pemerintahan yang terbuka dan demokratis dapat terwujud, yang akan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia.

- b. Putusan MK mengenai Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal ini tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang memberikan penegasan penting mengenai perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa HAM harus dijamin tanpa adanya diskriminasi, dan dapat dibatasi hanya dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan umum, ketertiban, dan moralitas yang menunjukkan bahwa meskipun HAM adalah hak fundamental yang harus dihormati, negara tetap memiliki kewenangan untuk membatasi hak tersebut demi menjaga kestabilan sosial dan kepentingan bersama. Namun, pembatasan tersebut harus didasarkan pada alasan yang sah dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Sebagai contoh, dalam putusan MK terkait kebebasan berpendapat, Mahkamah menggarisbawahi bahwa kebebasan ini tidak boleh dibatasi tanpa alasan yang jelas dan sah. "*Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang harus dijamin, tetapi pembatasan atas kebebasan berpendapat hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang sah, seperti untuk menjaga ketertiban umum atau moralitas*" (Mahkamah Konstitusi, 2008). Putusan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap penerapan HAM di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa kebebasan individu tetap dijaga tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial.

Lebih lanjut, putusan ini juga memperjelas bahwa hak-hak dasar yang tercantum dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan, tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan sosial. Dengan kata lain, meskipun HAM harus dilindungi, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai sosial yang lebih besar, seperti kepentingan umum, keselamatan negara, dan moralitas masyarakat.

Pentingnya pembatasan HAM ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, yang pada akhirnya mendorong terwujudnya tatanan sosial yang adil dan seimbang. Dalam konteks ini, hak-hak dasar warga negara dapat terlindungi dengan lebih tegas dan praktis, serta menambah pemahaman bahwa setiap hak memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Dengan demikian, putusan MK ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap HAM sekaligus memberi batasan yang jelas tentang bagaimana hak-hak tersebut dapat dibatasi demi kepentingan yang lebih besar, maka negara memiliki kewenangan untuk mengatur pembatasan terhadap hak-hak tersebut, tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan dengan alasan yang sah dan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan dan moralitas.

2. Dampak dan Implikasi terhadap UUD 1945

Berdasarkan hasil analisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa implikasi terhadap perubahan dan penafsiran UUD 1945 dapat dijelaskan lebih lanjut, antara lain:

a. Perubahan dalam Tafsiran Pasal-Pasal UUD 1945

Perubahan dalam tafsiran pasal-pasal UUD 1945 sering kali terjadi melalui keputusan-keputusan MK yang memberikan interpretasi baru

terhadap pasal-pasal yang sebelumnya ambigu atau tidak jelas. Salah satu contoh penting dari perubahan tafsiran ini adalah putusan MK terkait dengan pemilihan umum (pemilu). Dalam putusannya, MK mengklarifikasi dan memberikan batasan yang lebih tegas mengenai hak partisipasi politik warga negara, khususnya terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih. Sebelumnya, pasal-pasal yang mengatur tentang pemilu dalam UUD 1945 tidak sepenuhnya memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara yang ingin terlibat dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif atau eksekutif.

Dalam putusan MK tahun 2014, Mahkamah mengklarifikasi bahwa hak untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakannya. MK menegaskan bahwa untuk dapat memilih, seorang warga negara harus memenuhi syarat usia tertentu dan terdaftar dalam daftar pemilih. Begitu pula, untuk menjadi calon legislatif atau eksekutif, seseorang harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti usia minimum, kewarganegaraan, dan tidak terlibat dalam tindak pidana tertentu. *"MK memberikan batasan yang lebih jelas mengenai siapa yang berhak memilih dalam pemilu dan proses yang sah untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau eksekutif"* (Mahkamah Konstitusi, 2014).

Keputusan MK ini sangat penting karena memberikan kejelasan tentang proses politik yang harus diikuti oleh warga negara, sehingga tidak ada lagi interpretasi yang berbeda-beda mengenai hak untuk memilih atau kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi calon. Hal ini juga memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara teratur dan transparan, serta mengurangi potensi kebingungan yang mungkin timbul di kalangan masyarakat terkait dengan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pemilihan umum.

Dengan demikian, keputusan MK mengenai tafsiran pasal-pasal yang mengatur pemilu ini memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan pemahaman politik di Indonesia dan memastikan bahwa hak-hak politik warga negara dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 dan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan berlandaskan pada aturan yang jelas, serta mengurangi ruang untuk penyalahgunaan atau penafsiran yang dapat merugikan hak-hak politik warga negara.

b. Peningkatan Perlindungan Hak Konstitusional

Keputusan MK memainkan peran penting dalam peningkatan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Salah satu contoh nyata dari peningkatan perlindungan ini adalah putusan MK yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi dan negara. *"Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh UUD 1945, dan setiap upaya untuk membatasi*

kebebasan ini hanya dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan sah" (Mansyur, 2017).

Sebagai contoh konkret, dalam putusan MK yang terkait dengan kebebasan berekspresi, Mahkamah menegaskan bahwa hak untuk menyatakan pendapat di muka umum tidak boleh dibatasi tanpa alasan yang sah. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu yang diatur oleh hukum, seperti untuk menjaga ketertiban umum, keamanan negara, atau untuk melindungi hak-hak orang lain, seperti dalam hal pencemaran nama baik atau hasutan yang berpotensi merusak kerukunan sosial yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang mencoba membatasi hak-hak tersebut demi kepentingan tertentu, tanpa dasar hukum yang jelas dan sah.

Keputusan MK tersebut memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia, terutama dalam hal kebebasan berpendapat yang sebelumnya rentan disalahgunakan. Dalam banyak kasus, kebebasan berpendapat sering kali dibatasi atas dasar alasan yang tidak jelas atau sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang berkuasa. Dengan keputusan MK ini, perlindungan terhadap hak untuk berpendapat menjadi lebih kuat, dan masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dalam mengekspresikan pendapat mereka, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media sosial.

Selain itu, keputusan ini juga memberi kejelasan tentang batasan hak yang tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain atau merusak ketertiban umum. Dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pembatasan hak berpendapat, MK berperan dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, di mana masyarakat dapat bebas mengungkapkan pendapat tanpa takut mengalami pembatasan yang tidak sah atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, putusan MK ini meningkatkan perlindungan hak konstitusional di Indonesia dengan memperkuat dasar hukum untuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Hal ini memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dihormati dan dilindungi secara lebih tegas, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kebebasan individu.

c. Penguatan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan kebijakan negara terhadap UUD 1945, MK memastikan bahwa kebijakan dan praktik pemerintahan selalu sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945. Salah satu contoh penting dari penguatan prinsip negara hukum oleh MK adalah putusan yang terkait dengan peran serta kewenangan lembaga-lembaga negara, yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi, tanpa ada penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara tertentu. *"Putusan MK ini mengingatkan bahwa setiap lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus bekerja sesuai dengan*

batasan kewenangannya yang diatur dalam UUD 1945, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan" (Sudjana, 2020).

Dalam keputusan-keputusan tersebut, MK menegaskan bahwa semua kebijakan negara, baik yang diambil oleh Presiden, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya, harus berdasarkan pada UUD 1945. MK secara tegas mengingatkan bahwa tidak boleh ada lembaga negara yang bertindak di luar batas kewenangannya atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini penting dalam menjaga integritas sistem pemerintahan yang demokratis dan mencegah terjadinya praktik otoritarian yang dapat merugikan rakyat.

Keputusan MK ini berpengaruh besar dalam membentuk sistem pemerintahan yang lebih demokratis yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah berada dalam bingkai konstitusional, MK berperan dalam menjaga prinsip negara hukum yang mengutamakan keadilan dan akuntabilitas. Dalam sistem demokrasi, semua lembaga negara harus memiliki peran yang jelas dan tidak boleh saling melampaui kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, keputusan-keputusan MK yang memperkuat prinsip negara hukum ini memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adil. Setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945, sehingga MK memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa negara Indonesia tetap berjalan sebagai negara hukum yang demokratis.

d. Pengaruh terhadap Sistem Hukum Indonesia

Keputusan-keputusan MK memberikan dampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal:

1) Penguatan *Judicial Review*

Salah satu kontribusi terbesar MK terhadap sistem hukum Indonesia adalah penguatan *judicial review* atau uji materiil. MK memungkinkan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini memberikan ruang bagi rakyat untuk mengajukan permohonan uji materiil jika merasa haknya dilanggar oleh undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Contoh lainnya adalah putusan MK terkait pengujian Undang-Undang Pemilu, yang menguji konstitusionalitas batasan partisipasi politik tertentu dalam pemilu (Mahkamah Konstitusi, 2015).

2) Penerapan Prinsip Negara Hukum

Keputusan MK memperkuat prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana semua tindakan negara harus berdasarkan hukum yang sah, dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, putusan MK terkait penggunaan

kekuasaan negara dalam sektor ekonomi, yang memperjelas bahwa kebijakan ekonomi harus mengacu pada prinsip hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak ekonomi rakyat (Situmorang, 2018).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia. Keputusan-keputusan MK bukan hanya menjaga kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi dan negara hukum, serta memastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tetap berada dalam kerangka konstitusional. Selain itu, keputusan-keputusan MK memberikan dampak besar terhadap pemahaman dan penerapan UUD 1945, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya dalam praktik sehari-hari yang salah satunya adalah implementasi keputusan MK oleh lembaga-lembaga negara yang terkadang masih belum optimal, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Kesimpulan

Keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan dan penafsiran pasal-pasal dalam UUD 1945. Melalui penguatan dan penegasan konstitusi, MK berperan dalam menjaga konsistensi hukum negara dan memastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tetap berada dalam bingkai negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau perkembangan putusan MK dan dampaknya terhadap sistem hukum serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Untuk memperkuat perannya, MK perlu meningkatkan sosialisasi putusan-putusan yang dikeluarkan, memastikan implementasi keputusan dalam praktik pemerintahan, serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap undang-undang. Selain itu, melibatkan lebih banyak partisipasi publik dalam proses judicial review dan menyusun pedoman penafsiran yang lebih jelas akan membantu memastikan konsistensi tafsiran UUD 1945. Dengan langkah-langkah ini, MK dapat lebih efektif dalam menjaga dan mengembangkan sistem hukum Indonesia, serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar negara.

DAFTAR PUSTAKA:

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Pengangkatan Pejabat Negara*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Warga Negara*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Pemilu*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mansyur, H. (2017). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Situmorang, A. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, R. (2020). *Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Mansyur, H. (2017). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan UUD 1945 dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mardani, A. (2020). *Analisis Hukum Konstitusional Indonesia: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Situmorang, A. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, R. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*. Diakses dari <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
- Marbun, D. (2018). *Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Konstitusional: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsirkan UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Azzam.